

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT**



**PEMBERDAYAAN KELOMPOK GELANDANGAN DAN PENGEMIS
BERBASIS KEUNGGULAN POTENSI LOCAL PADA DESA PRAGAAN
SUMENEP**

Oleh

Drs. Hasan Basri, M.Si
Imam Syafi'i, M.H

0020126101 (ketua pengusul)
0706018207 (anggota pengusul)

**STKIP PGRI SUMENEP
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PEMBERDAYAAN KELOMPOK GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERBASIS KEUNGGULAN POTENSI LOCAL PADA DESA PRAGAAN SUMENEP

Peneliti
Nama lengkap : **Drs. Hasan Basri, M.Si**
Perguruan tinggi : STKIP PGRI Sumenep
NIDN : 0020126101
Jabatan fungsional : Lektor/ IIIb
Program Studi : PPKn
Nomor HP :
Alamat surel : hasanbasri@stkipgrisumenep.ac.id

Anggota(I)
Nama lengkap : **Imam Syafi'i, M.H**
NIDN : 0706018207
Perguruan tinggi : STKIP PGRI Sumenep

Institusi Mitra
Nama Institusi Mitra : Pilar Sejahtera
Alamat mitra : Desa Pragaan
Penanggungjawab :
Tahun Pelaksanaan : tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya tahun berjalan : Rp. 7.000.000
Biaya keseluruhan : Rp. 7.000.000

Sumenep, 20 Mei 2020

Ketua Pelaksana



Drs. Hasan Basri, M.Si
NIDN. 0020126101



Mengetahui,
Ketua STKIP PGRI Sumenep

Dr. Asmoni, M.Pd
NIK. 07731015



Kepala LPPM
STKIP PGRI Sumenep

Mulyadi, M.Pd
NIK. 07731135

RINGKASAN

Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) menjadi tidak sedap dipandang. Mereka adalah korban penyimpangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Gepeng masih membutuhkan perhatian untuk masa depannya. Untuk meningkatkan keterampilan Anjal maka pada program pengabdian ini diberikan pelatihan vokasi berbasis internet, membuat email dan akun di olx.co.id, menawarkan barang di olx.co.id, menghapus barang yang sudah terjual di olx.co.id untuk bisnis online melalui olx.

Bertempat di Laboratorium Komputer Jurusan PPKn STKIP PGRI Sumenep dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 12 orang dari 20 undangan yang diberikan, pelatihan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juli 2016. Metode yang digunakan adalah ceramah, praktek, tanya jawab dan jawaban, diskusi dan praktek.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara umum terdapat peningkatan pengetahuan peserta pelatihan pemberdayaan Anjal melalui pelatihan desain web untuk bisnis online. Indikator peningkatannya yaitu peserta yang memiliki email meningkat 67% dari 4 orang menjadi 12 orang. Pemahaman peserta tentang penjualan online meningkat 59% dari 2 orang menjadi 9 orang. Peserta yang sudah mempunyai bisnis penjualan online meningkat 58% dari 1 orang menjadi 8 orang. Hasil akhir yang diharapkan dari pendapatan kelompok gepeng mandiri remaja, mapan dan mereka dapat menjadi contoh teladan bagi masa kecil lainnya.

Kata Kunci: Pemberdayaan Gepeng, pelatihan vokasi, berbasis internet.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Analisis situasi

Keberadaan negara memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai institusi publik yang hadir memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dibidang pemenuhan hak-hak asasi manusia, Indonesia telah meratifikasi beberapa peraturan perundang-undangan seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Tentunya jaminan pemenuhan HAM tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip nilai yang terkandung dalam demokrasi. Demokrasi menjamin dua aspek penting didalamnya yaitu persamaan dan kemerdekaan (*equality and freedom*). Dua prinsip inilah yang menjadi pilar pelaksanaan demokrasi suatu negara.

Karena itu sejalan dengan perkembangan prinsip-prinsip negara *welfarestate*, negara hadir sebagai institusi publik yang harus memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Guna mewujudkan tujuan negara itulah negara harus melibatkan actor lain diluar negara untuk menjamin prinsip efisiensi dan redistribusi dalam penyelenggaraan negara. Aspek kesejahteraan tentu merupakan cita-cita penting sebuah negara sebagai teracantum dalam pembukaan UUD alinea ke IV. Bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat seringkali menjadi indicator kemajuan suatu negara dari berbagai aspek, artinya bangsa atau negara dapat dikatakan maju dan berhasil apabila kesejahteraan masyarakatnya telah terpenuhi. Kemiskinan menjadi salah satu penghambat dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Persoalan kemiskinan menjadi persoalan besar bagi negara-negara berkembang. Bahkan menurut Nugroho (2000:77) kemiskinan tidak hanya sekedar melanda negara berkembang, melainkan juga beberapa negara maju.

Tentunya dampak dari kemiskinan itu sendiri menyebabkan munculnya beberapa masalah sosial, beberapa diantaranya adalah semakin berkembangnya tunawisma. Munculnya gepeng dan pengemis (gepeng) bahkan Gelandangan dan Pengemisjuga disebabkan oleh persoalan kemiskinan yang melanda masyarakat. Masalah sosial merupakan masalah yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat terutama masalah di daerah perkotaan, salah satunya yaitu tingginya angka pengangguran. Selain itu, modernisasi dan industrialisasi yang terjadi juga telah kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa warga yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Permasalahan sosial tersebut merupakan akumulasi atau puncak dari berbagai kompleksitas masalah yang ada, seperti pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Sebagai negara berkembang tentu persoalan sosial masyarakat seperti kemiskinan menjadi agenda utama bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan potensi kemiskinan

masyarakatnya yang relatif masih tinggi, meski telah terjadi penurunan namun angka kemiskinan tetap menjadi perhatian bersama pemerintah ditengah kepadatan penduduk yang juga semakin tinggi. Permasalahan sosial diatas tentu terjadi akibat dari ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan sumber daya manusia. Sementara disisi lain daya dukung sumber-sumber pendapatan semakin menipis yang justru akan menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan penduduk semakin sulit dihindari.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penambahan kebutuhan yang beragam, dimana seseorang tidak hanya cukup memiliki satu kebutuhan saja, akan tetapi memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, lapangan pekerjaan, dan pendidikan.

Faktanya tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang dari sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2012 sudah mencapai 1,606.00 jiwa untuk penduduk kota dan 3,354.60 jiwa untuk penduduk desa (bps.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan untuk seluruh masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari belum meratanya pembangunan di setiap daerah, terutama daerah-daerah pelosok atau pinggiran, yang sering luput dari perhatian pemerintah.

Kesenjangan pembangunan di Sumenep disamping memicu tingginya kemiskinan juga menjadi sebab tingginya mobilisasi penduduk ke daerah kota-kota besar seperti Jakarta bahkan ke luar negeri untuk mencari peruntungan. Namun upaya yang tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian dan pengetahuan yang terspesialisasi menjadikan nasib mereka hanya sebagai pekerja atau buruh kasar. Mereka yang terlanjur datang ke kota dan tidak memiliki bekal yang cukup untuk mendapat pekerjaan yang layak, bekerja serabutan dan tidak tetap. Walaupun begitu mereka tetap bertahan tinggal di kota, karena mereka berpikir lebih mudah mendapatkan uang di kota daripada di desa.

Pola pikir seperti inilah yang menyebabkan kebanyakan masyarakat desa memberanikan diri datang ke kota walaupun tidak memiliki bekal keahlian. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka yang terjadi adalah perluasan masalah sosial yang semakin tinggi, contohnya yang banyak terjadi di wilayah perkotaan lain yaitu semakin maraknya pengemis dan gepeng. fenomena inipun juga terjadi di wilayah Sumenep, sejak tahun 2012 hingga pada tahun 2014 menurut data dinas sosial Sumenep menyebutkan bahwa jumlah gepeng yang sudah terjaring mencapai 120 orang, bahkan daerah sebagai penyuplai kelompok gepeng ini adalah kecamatan pragaan 41 orang, batuputih 30 orang dan batang-batang 19 orang (radarmadura.co.id)

Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa perbuatan gepeng dan pengemis dihukum dengan pidana kurungan, sebaliknya dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. UU No.40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional (SJSN) merupakan produk hukum sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap masyarakat. jaminan perlindungan sosial adalah bentuk jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat untuk hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (pasal 1 ayat 1 UU No.40/2004). Bentuk jaminan sosial tersebut adalah :

- a. Jaminan kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun; dan
- e. Jaminan kematian

Disamping peraturan diatas, negara juga mengatur aspek pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, penyelenggaraan sosial dimaksudkan untuk upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yng meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan (pasal 1 ayat 2 UU No.11/2009). Diantara kelompok sosial prioritas yang secara kemanusiaan memiliki masalah-masalah sosial adalah :

- a. Kemiskinan
- b. Ketelantaran
- c. Kecacatan
- d. Keterpencilan
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- f. Korban bencana dan
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi.

Permasalahan sosial seperti anak jalanan, gepeng dan pengemis merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Disamping sebagai fenomena sosial masyarakat sebagai akibat tingginya angka kemiskinan pada masyarakat, fenomena inipun juga terjadi karena factor kultural masyarakat. Faktor budaya disebabkan karena menjadi gepeng lebih merupakan profesi yang paling instan dan bahkan lebih menjanjikan dibandingkan harus menjadi pekerja buruh kasar atau bahkan menjadi petani. Inilah yang umum terjadi pada beberapa warga Pragaan. Menjadi gepeng tidak selalu disebabkan karena tekanan ekonomi karena keterpaksaan tapi lebih karena pembiasaan dan kebiasaan hidup instan beberapa masyarakat.

Kompleksitas persoalan pada anak jalanan, gepeng dan pengemis sebagaimana negara mengamanatkan perlindungan sosial bagi mereka tentu harus dilaksanakan dengan optimal. Sesuai dengan prinsip penegakan HAM, negara menjamin setiap warga negara mendapatkan hak yang sama. Beberapa jaminan

pemenuhan hak yang didapatkan masyarakat salah satunya adalah hak perlindungan sosial dan hak politik. Pemerintah melalui beberapa peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan sosial untuk hidup layak baik mereka yang menyandang cacat, anak bahkan pada mereka yang sudah berusia lanjut (pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No 39/1999 tentang HAM).

Disamping pemenuhan hak sosial sebagaimana dijelaskan diatas, negara juga menjamin pemenuhan hak politik bagi setiap warga negara. semua warga negara tanpa memandang status sosial juga berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dipilih maupun memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (pasal 43 ayat 1 UU No.39/1999). Kelompok Gelandangan dan Pengemis dan gepeng adalah kelompok masyarakat yang juga semestinya tidak hanya sekedar mendapatkan perlindungan sosial baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka secara layak melainkan juga lebih pada bentuk pemberdayaan sosial yang lebih berkelanjutan dalam berbagai aspek baik pemenuhan hak sosial maupun pemenuhan hak-hak politiknya.

Berdasarkan konteks ini negara memang telah menjamin pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi kelompok gepeng melalui program kesejahteraan sosial diatas baik dalam bentuk program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial melalui life skill maupun vokasional skill, namun pada aspek pemenuhan hak politik pemerintah masih saja menganggap mereka (gepeng) sebagai kelompok masyarakat marginal dan tidak terdidik. Tingginya angka golput dan partisipasi publik masyarakat adalah gambaran lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Memang rendahnya partisipasi politik masyarakat ini bukan hanya terjadi pada kelompok sosial tertentu seperti kelompok gepeng dan Gelandangan dan Pengemis bahkan juga pada sebagian masyarakat pada umumnya. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa saja merupakan factor kegagalan pemerintah dalam pembangunan nasional, sementara dibalik tingginya angka kemiskinan ini selalu menimbulkan masalah sosial baru. Meningkatnya kelompok-kelompok masyarakat miskin, gepeng dan pengemis adalah fenomena sosial yang selalu datang. Ditengah ketidakpercayaan publik pada pemerintah sebagai akibat proses pemiskinan structural ini justru semakin memperparah kondisi sosial masyarakat dalam kubangan jurang kemiskinan.

Mengingat potensi persoalan sosial semakin meningkat ditengah program pembangunan nasional yang terus berjalan, maka angka kemiskinan akan sulit dihindarkan jika tidak diatasi dengan maksimal. Sementara di sisi lain kelompok gepeng juga berpotensi akan terus bertambah tiap tahunnya, karena itu negara tidak bisa melepaskan bentuk pemenuhan hak-hak politik bagi masyarakat. kelompok gepeng berdasarkan konstitusi juga memiliki hak yang sama hanya mungkin ketidakmampuan mereka untuk mengartikulasikan kepentingannya menyebabkan mereka memilih apatis bahkan tidak peduli. Lemahnya kesadaran politik bagi kelompok gepeng bagaimanapun tetap menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk negara melalui program pemberdayaan sosial berkelanjutan agar mereka bisa menikmati hak-hak mereka secara layak tidak hanya dibidang

pemenuhan sosial melainkan juga dibidang pemenuhan hak-hak politik masyarakat.

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian untuk menggambarkan bagaimana proses pemenuhan hak-hak sosial kelompok gepeng melalui bidang pemberdayaan sosial yang berkelanjutan agar mereka menjalankan fungsi sosialnya secara layak seperti masyarakat pada umumnya.

2. Permasalahan mitra

- a. Desa sebagai unit penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan terkecil di desa masih belum berhasil mengembangkan SDM warga desa setempat lebih kreatif dan inovatif tanpa bergantung pada profesi sebagai penggelandang dan pengemis
- b. Meski sudah terbentuk kelompok pemerhati sosial "Pilar Sejahtera" pengelolaan lembaga ini secara organisatoris dan fungsional masih terkendala dengan SDM yang berkualitas ditambah dengan masih minimnya pengetahuan dan keterampilan para relawan dalam penanganan kelompok sosial semacam kelompok gelandangan dan pengemis.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target

Target pengabdian pada masyarakat adalah kalangan masyarakat dengan kategori kelompok gelandangan dan pengemis agar terpenuhinya kehidupan dan jaminan sosial yang layak sebagaimana manusia pada umumnya

B. Luaran

Sosialisasi, pelatihan sekaligus pendampingan yang dilakukan bagi mitra diharapkan mampu memberikan pemahaman, peningkatan kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang penanganan dan keterampilan pengelolaan kelompok-kelompok gelandangan dan pengemis dikabupaten Sumenep.

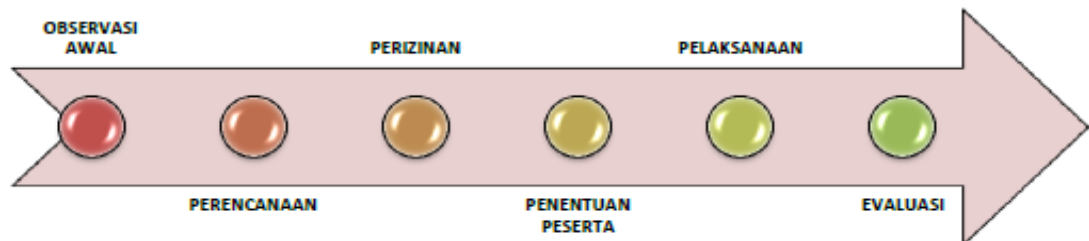
BAB III METODE PELAKSANAAN

1. Waktu dan tempat

Metode pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif transformatif. Proses pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat (para peternak sapi dan warga desa karangcempaka) secara penuh melalui serangkaian workshop dan pelatihan. Dalam pendekatan partisipatif ini, pada tahap awal akan dilakukan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, yaitu metode untuk mendapatkan deskripsi persoalan dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan PRA sangat bermanfaat agar masyarakat peternak sapi mengetahui secara lebih luas mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi, potensi, dan peluang-peluang yang dapat mereka raih dengan hasil fermentasi pakan. Setelah masyarakat peternak sapi memahami persoalan yang mereka hadapi, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan program pemberdayaan yang meliputi pengenalan dan manfaat pakan fermentasi, pelatihan pengolahan pakan fermentasi, pembelajaran instalasi bahan organik dalam pakan, pendampingan pengolahan pakan fermentasi. Disamping itu mitra juga akan mendapatkan pelatihan pemanfaatan kotoran sapi hasil fermentasi pakan menjadi pupuk organik

2. Metode pelaksanaan

Secara sistematis, aspek-aspek pemberdayaan yang akan dikembangkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Alur pelaksanaan PKM dengan skema berikut:



BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

1. Kualifikasi tim pelaksana kegiatan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP PGRI Sumenep memiliki motivasi kuat dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai pusat layanan yang dimilikinya, antara lain Pusat Studi Kebijakan, Pusat Layanan KKN dan KKL, dan Pusat Layanan Kewirausahaan dan Konsultasi karir. Jumlah kegiatan LPPM dosen STKIP PGRI Sumenep dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, LPPM telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian dengan memberdayakan potensi stakeholder dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data base LPPM tahun 2011, terdapat 57 kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan baik dengan pendanaan dari DIPA lembaga maupun dari DP2M Dikti dengan besaran dana Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-. Berdasarkan capaian yang diperoleh LPPM STKIP PGRI Sumenep dapat dikategorikan sebagai bentuk kinerja yang sangat membanggakan dan akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja LPPM kedepannya.

Dalam program penerapan IPTEKS bagi masyarakat ini diperlukan kepakaran yang mengetahui tentang berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi mitra. Berdasarkan analisis situasi yang ada, maka permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman akan urgensi pengelolaan pasar tradisional ramah lingkungan.

2. Pembagian tugas tim pelaksana kegiatan

Dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan pengabdian pada masyarakat kelompok peternak, maka dilaksanakanlah pembagian tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pelaksana secara umum akan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan hasil pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan pasar ramah lingkungan.
2. Anggota tim pelaksana sebagai anggota tim pelaksana yang memiliki keahlian dibidang psikologi dan rehabilitasi sosial yang akan bertanggung jawab memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok gepeng.

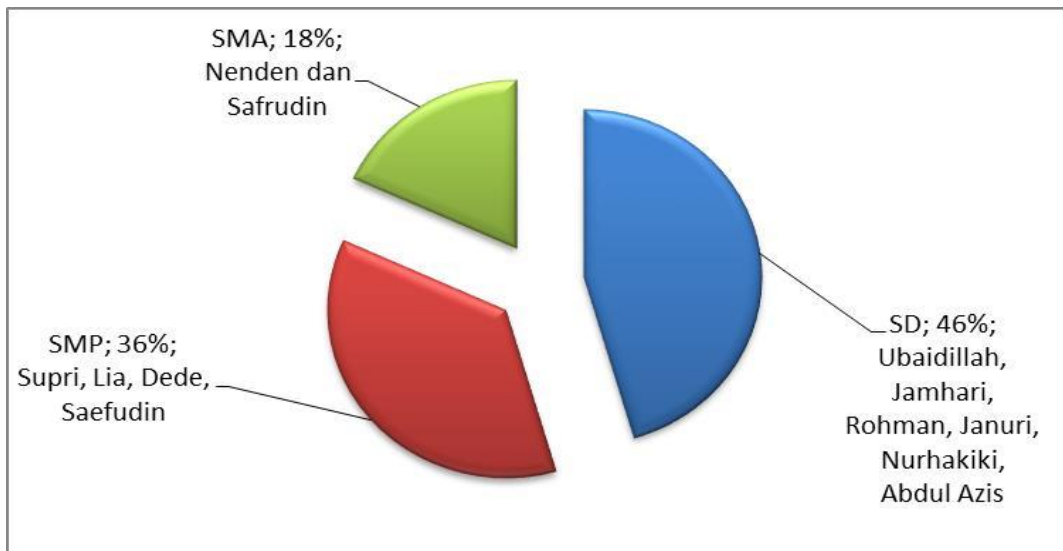
BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang sudah dicapai pada pengabdian pada masyarakat ini adalah telah dilaksanakan pelatihan vokasional Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Di Desa Pragaan dengan topik *Desain Website Untuk Usaha On-line*. Peserta yang hadir adalah 12 orang dari 20 orang yang diundang atau 60%, hal ini dikarenakan Anjal masih memiliki ketakutan/malu untuk masuk kampus, sehingga kedepan perlu sosialisasi lebih baik lagi agar kampus tidak menjadi tempat yang ditakuti tetapi menjadi tempat untuk menemukan solusi-solusi permasalahan termasuk masalah sosial masyarakat.

Adapun nama-nama peserta yang dari daftar peserta yang hadir terlihat mayoritas adalah lulusan Sekolah Dasar 46%, SMP 36% dan SMA adalah hadir terlihat pada Tabel 5.1.

NO	NAMA	STATUS
1.	UBAIDILLAH	PESERTA
2.	JAMHARI	PESERTA
3.	SUPRI	PESERTA
4.	ROHMAN	PESERTA
5.	JANURI	PESERTA
6.	LIA	PESERTA
7.	DEDE	PESERTA
8.	NENDEN	PESERTA
9.	SAEFUDIN	PESERTA
10.	NURHAKIKI	PESERTA
11.	SAFRUDIN	PESERTA
12.	ABDUL AZIS	PESERTA

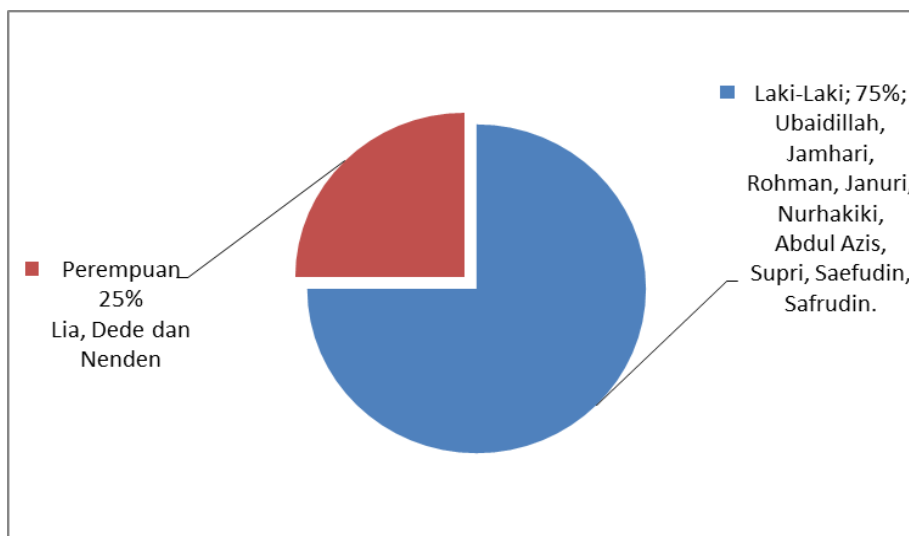
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pelatihan vokasional ini menggunakan metode pelatihan langsung (*hands on*) berupa pemaparan/presentasi, tutorial, dan langsung praktik di depan komputer yang terhubung dengan internet.



Gambar 5.1 Persentase tingkat pendidikan peserta pelatihan

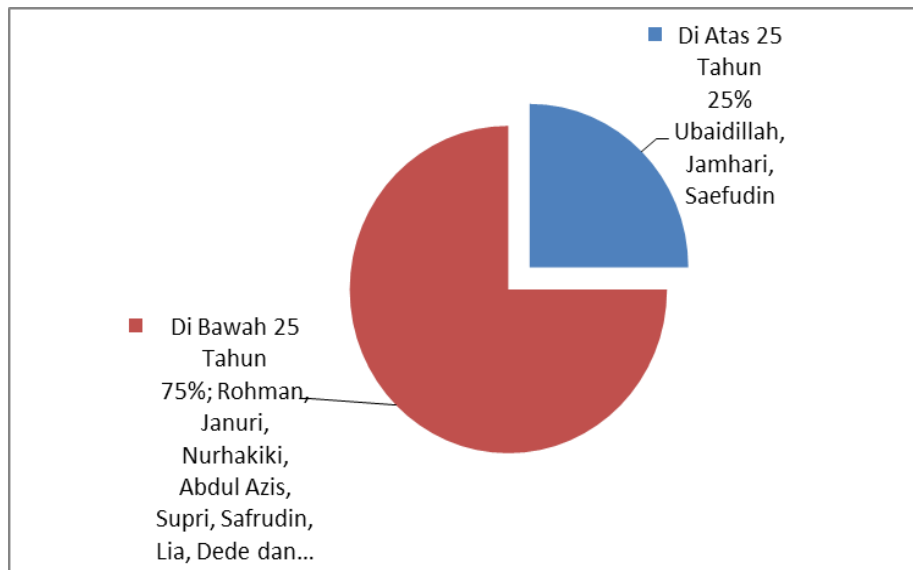
Pada pelaksanaan pelatihan, kami juga melakukan *survey* terhadap peserta pelatihan, adapun data yang kami peroleh adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jenis kelamin, peserta pelatihan ini terdiri dari 75% laki-laki dan 25% perempuan seperti terlihat pada Gambar 5.2.



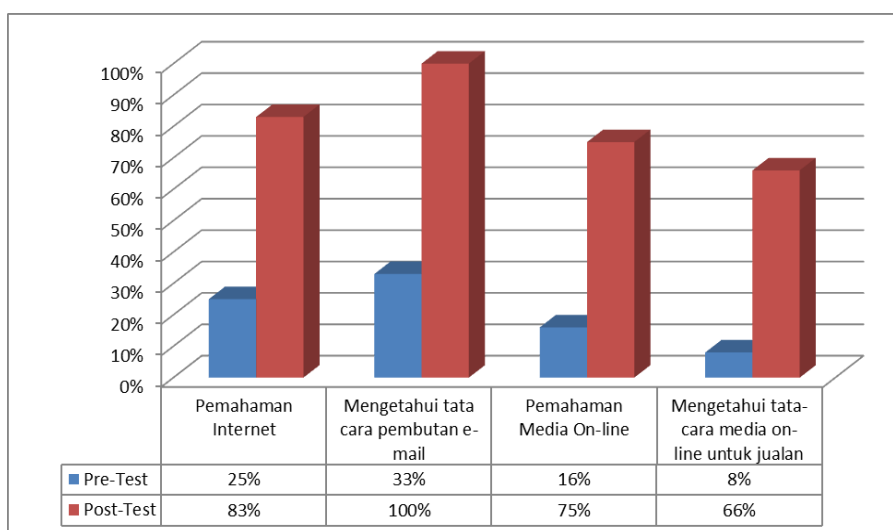
Gambar 5.2 Persentase peserta berdasarkan jenis kelamin

Untuk *range* usia peserta berusia 15 tahun s.d. 29 tahun yang terbagi dalam dua kelompok usia yaitu ≤ 25 tahun sebanyak 9 orang dan > 25 tahun sebanyak 3 orang seperti terlihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Persentase peserta berdasarkan umur

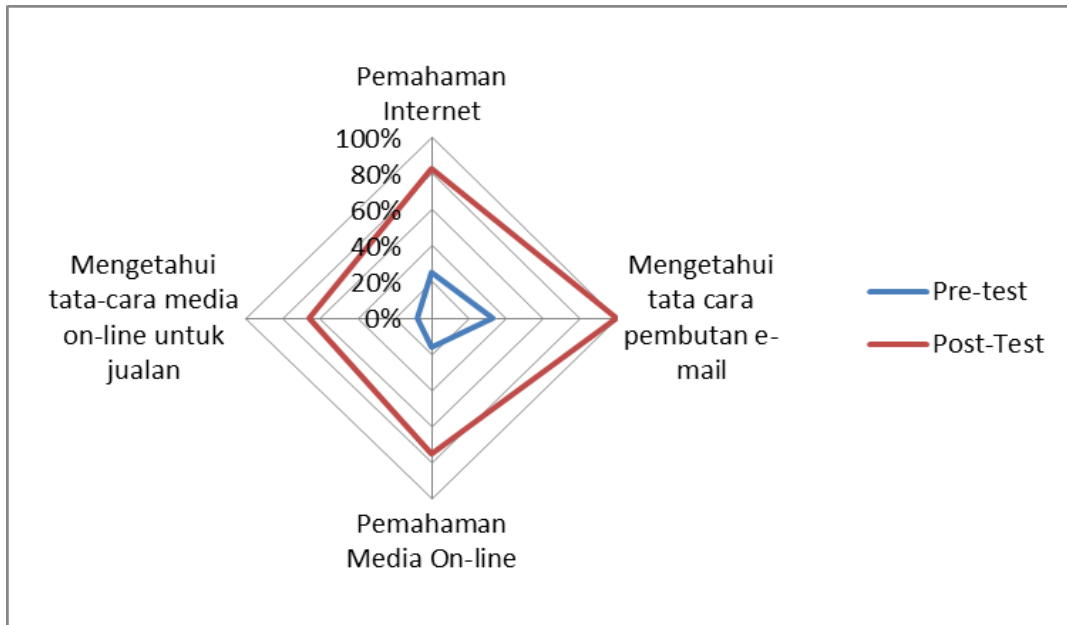
Dalam proses evaluasi dan pengukuran hasil dari pelatihan ini, peserta pelatihan mendapat soal *pre-test* dan *post-test*. Adapun hasil yang didapat adalah pada proses *pre-test* berupa data umum berupa pengalaman dalam menggunakan *computer* dan *Handphone*. Analisis data berupa, sebanyak 25% dari 12 peserta yang hadir telah menggunakan *Handphone* yang terhubung internet. Peserta yang telah memiliki *e-mail* sebanyak 4 orang atau 33%. Peserta yang mengetahui media untuk usaha *on-line* adalah 2 orang atau 16%. Peserta yang mengetahui tata cara untuk berjualan secara *on-line* 1 orang atau 8%. Peserta yang sudah memiliki usaha mandiri sebanyak 1 orang atau 8%.



Gambar 5.4 Grafik persentase peningkatan penyerapan materi

Untuk pemahaman materi, dari hasil *pre-test* dan *post-test* dilakukan analisis, seperti terlihat pada Gambar 5.5. Berdasarkan hasil pergerakan grafik radar rata-rata peserta dapat dianalisis lebih

dalam tentang sub topik yang mempengaruhi perubahan pemahaman peserta, adapun pengetahuan tentang tata cara pembuatan e-mail mengalami peningkatan yang paling signifikan yaitu 67%.



Gambar 5.5 Grafik pemahaman materi pelatihan

Faktor ini menjadi pendukung kegiatan pelatihan vokasional ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian. Hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini dapat diidentifikasi diantaranya antusiasme para peserta pelatihan dan dukungan dari Jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Antusiasme para peserta dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul ketika pelaksanaan diskusi dan *hands on* pelatihan.

Faktor penghambat kegiatan selama pelaksanaan ada beberapa hal yang diidentifikasi diantaranya adalah faktor pendidikan Anjal yang rendah sehingga malu/takut masuk kampus. Disamping itu kurangnya sosialisasi dan pendekatan terhadap Anjal sehingga informasi pelatihan kurang merata di seluruh Kota Cilegon.

Untuk meminimalisasi faktor hambatan ini, sebaiknya pelatihan vokasional ini dapat dilakukan lagi bagi Anjal-anjal yang lain yang ada di Kota Cilegon, sehingga pemerataan pengetahuan akan tersebar terhadap Anjal untuk dapat lebih mandiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Program Pengabdian pada Masyarakat yang telah sukses dilaksanakan dapat diberikan beberapa kesimpulan diantaranya adalah Pengabdian pada Masyarakat dapat menjadi perekat tali silaturahmi antara Kampus dan masyarakat sehingga dapat dirasakan manfaat kehadiran PT di masyarakat secara luas.

Penyuluhan dan Pelatihan vokasional usaha secara on-line sangat dibutuhkan oleh para Anjal dan menjadi sesuatu yang sangat berguna dan menyenangkan. Anjal memerlukan pemberdayaan - pemberdayaan untuk menambah kapasitas diri mereka sehingga meningkatkan kepercayaan diri dalam meniti kehidupan.

Indikator peningkatan ditunjukkan peserta yang memiliki e-mail meningkat 67% dari 4 orang menjadi 12 orang. Peserta yang mengetahui atau memahami tempat jualan secara on-line meningkat 59% dari 2 orang menjadi 9 orang. Peserta yang telah memiliki usaha jualan on-line meningkat 58% dari 1 orang menjadi 8 orang. Hasil akhir yang diharapkan adalah Anjal berpenghasilan, anjal mandiri, anjal mapan dan anjal bisa menjadi contoh teladan untuk anjal-anjal yang lain.

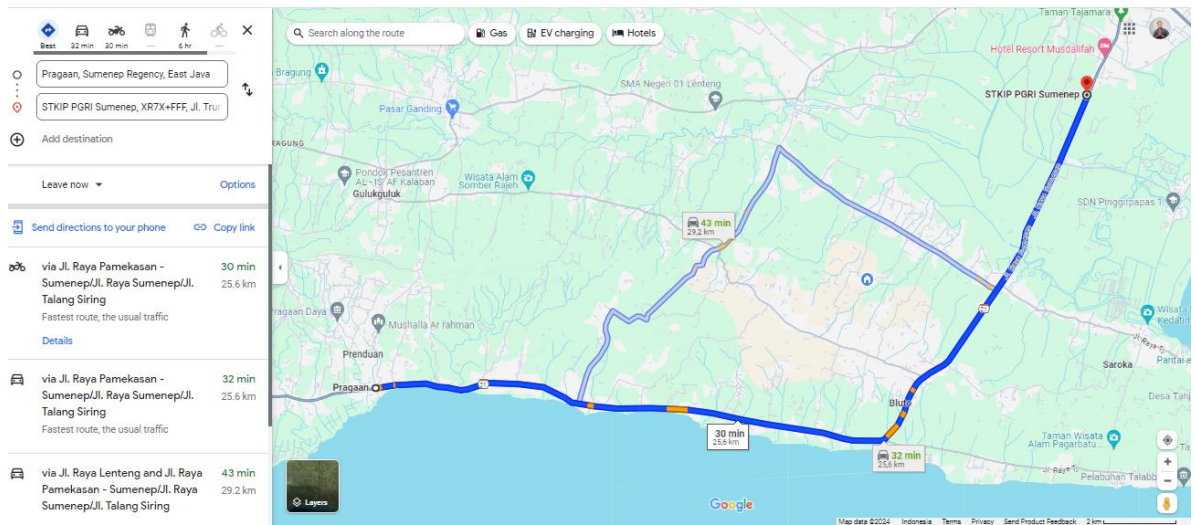
B. Saran

Kegiatan pengabdian bina desa ini perlu dilaksanakan di tempat yang berbeda dengan potensi yang lebih besar, serta perlu pendampingan kepada mitra dan para peserta

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Afwan, M. (2012). Pendidikan Karakter Anak Jalanan Melalui Program Pendidikan Agama Islam Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Chitrasari, N., Rahmawati, R., & Maisaroh, I. (2012). Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Dinas Sosial Kota Cilegon, 2012, "Data Anak Jalanan Kota Cilegon", Cilegon: Depsos.
- Ishaq, M. (1998). "Pengembangan Modul Literasi Jalanan untuk Peningkatan Kemampuan Hidup Bermasyarakat Anak-anak Jalanan". Makalah. Lokakarya Modul Literasi Jalanan di BPKB Jayagiri-Lembang, 24-25 Maret 1998. Bandung : Yayasan Bahtera- Unicef.
- Kindervater, S. (1979). National Education as An Empowering Process. Massachusetts : Center for International Education University of Massachusetts.
- Mangkoespoetra, A. A. (2005), Pemberdayaan Anak Jalanan. Makalah Pribadi, SMAN, Vol.21.
- Ricardho Cappello, 2007, Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Keluarga, Harian Suara Karya, Jakarta.

A. PETA LOKASI



Jarak lokasi mitra dengan PT pengusul dapat ditempuh sekitar 43 menit menuju lokasi yang berjarak sekitar 29,2 Km dari lokasi PT pengusul.